



JIGE 7 (1) (2026) 87-99

JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4735>

Implementasi Analisis Standar Belanja (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah)

Nurul Fadila^{1*}, Rahma Masdar¹, Haryono Pasang Kamase¹, Selmita Paranoan¹, Masrudin¹, Arif Gunarsa¹

¹ Faculty of Economics and Business, Tadulako University, Indonesia

*Corresponding author email: fadila06082002@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 06 2025

Approved December 15, 2025

Keywords:

Analysis of Spending Standards (ASB), fairness of costs, performance reports, Regional Government Unit of Tolitoli Regency

ABSTRACT

This study aims to analyze the reasonableness of costs for performance report preparation programs in each Regional Government Organization (OPD) of Tolitoli Regency. The approach used is descriptive quantitative, with secondary data in the form of the 2024 Tolitoli Regency Regional Government Work Plan (RKPD) document. Data analysis was carried out using simple linear regression with the help of SPSS software. The results show that the regression equation obtained is: $Y = -22,780,831,863,267 + 3,665,682,455,393X$, where X represents the number of performance report preparation activities/reports and the summary of OPD performance realization as a cost driver. Based on the results, 3 OPDs are in the underfinancing category, 20 OPDs are in the overfinancing category, and 6 OPDs are in the reasonable cost category. These findings indicate that there is still an imbalance in the allocation of expenditure budgets in Tolitoli Regency. The implementation of ASB (Expenditure Standards Analysis) is expected to help the regional government to prepare a budget that is more target, while also increasing transparency and accountability in the use of public funds.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajaran biaya program penyusunan laporan kinerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tolitoli. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = -22.780.831.863.267 + 3.665.682.455.393X$, di mana X merepresentasikan jumlah kegiatan/penyusunan laporan kinerja dan ringkasan realisasi kinerja OPD sebagai cost driver. Berdasarkan hasil, terdapat 3 OPD yang termasuk dalam kategori underfinancing, 20 OPD dalam kategori overfinancing, dan 6 OPD dalam kategori biaya wajar. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran belanja di Kabupaten Tolitoli. Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Fadila, N., Masdar, R., Kamase, H. P., Paranoan, S., Masrudin, M., & Gunarsa, A. (2026). Implementation of Expenditure Standards Analysis (Case Study on The Regional Government of Tolitoli Regency, Central Sulawesi Province). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 87–99. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4735>.

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, keberhasilan pemerintahan tidak lagi diukur semata-mata dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa mendalam dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh institusi pemerintahannya. Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan penyelenggaraan layanan publik, diharapkan mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan merata. Namun, harapan tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa fondasi pengelolaan keuangan yang solid. Anggaran publik bukan sekadar serangkaian angka; ia merupakan instrumen yang kuat yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program pembangunan. Dengan kata lain, kualitas pengelolaan anggaran secara langsung mencerminkan kualitas layanan publik (Rosika & Frinaldi, 2023).

Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan pengelolaan anggaran. Namun, daerah ini menghadapi tantangan klasik, yaitu bagaimana merancang anggaran yang efisien dan efektif sekaligus sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Masalahnya bukan pada ketiadaan regulasi, karena pedoman yang jelas telah ada, melainkan kesenjangan yang terus terjadi dalam praktik. Sering kali, anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara pengawasan pemanfaatan dana masih terbatas (Bappeda Tolitoli, 2020). Akibatnya, semangat efisiensi yang digagas dalam kerangka kebijakan tidak sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran.

Belanja pemerintah sejatinya merupakan instrumen strategis. Belanja pemerintah bukan sekadar alokasi angka dalam dokumen APBD, tetapi cerminan nyata bagaimana pemerintah memprioritaskan warganya. Apabila belanja publik didistribusikan secara adil dan proporsional, seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, analisis belanja pemerintah menjadi sangat penting. Pertanyaan utama adalah apakah APBD telah digunakan secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertanyaan ini menegaskan pentingnya Analisis Standar Belanja (ASB), sebuah alat yang dirancang untuk menilai kewajaran biaya setiap program dan kegiatan (SKPD & Magelang, 2025).

Secara hukum, penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) bukanlah konsep baru. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah secara jelas mewajibkan pemerintah daerah menyusun anggaran berdasarkan analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar pelayanan minimum (Nas et al., 2020). Dengan kerangka hukum yang kuat ini, ASB seharusnya dapat diterapkan secara konsisten di seluruh daerah. Namun dalam praktiknya, kesenjangan antara regulasi dan kenyataan masih lebar; banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih belum sepenuhnya mengadopsi ASB dalam proses perencanaan mereka, sehingga terjadi inefisiensi dalam alokasi anggaran.

Penelitian sebelumnya mengenai ASB telah dilakukan di berbagai daerah, misalnya di Kota Lhokseumawe (Sari et al., 2022), Kota Padang (Sari & Suryadi, 2024), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Agustina & Ritonga, 2020). Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi signifikan, sebagian besar fokus pada pemodelan teknis dan penilaian matematis alokasi belanja. Namun, konteks di Tolitoli berbeda. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang ASB, banyak SKPD yang belum mengintegrasikannya ke dalam perencanaan anggaran mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terus berlangsung antara desain kebijakan dan penerapannya di lapangan.

Di sinilah letak kebaruan penelitian ini. Alih-alih mengulang pendekatan yang telah ada, penelitian ini berupaya menganalisis ASB di Tolitoli secara lebih komprehensif. Tujuannya tidak hanya untuk menilai kewajaran biaya, tetapi juga mengeksplorasi tantangan dalam implementasi serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Dengan perspektif yang lebih luas ini, penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menciptakan sistem anggaran yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil yang terukur. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya dalam menghubungkan evaluasi teknis anggaran dengan praktik nyata dan tantangan implementasi kebijakan.

Akhirnya, anggaran publik jauh lebih dari sekadar dokumen keuangan. Anggaran mencerminkan ekspektasi publik, janji pemerintah, dan arah pembangunan daerah. Kabupaten Tolitoli memiliki peluang besar untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan untuk kesejahteraan warganya. Melalui penerapan ASB secara konsisten, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sesuai peraturan, tetapi juga bermakna dalam dampaknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam sistem penganggaran Tolitoli, mengevaluasi kewajaran belanja melalui ASB, dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk tata kelola keuangan yang lebih baik. Tujuan akhirnya adalah mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sugiarto, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek penelitian secara faktual berdasarkan data yang tersedia. Data penelitian diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-OPD) Kabupaten Tolitoli tahun 2024. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Analisis ini dilakukan untuk menilai kewajaran biaya dalam penyusunan laporan kinerja di setiap OPD, dengan mempertimbangkan jumlah kegiatan atau laporan kinerja sebagai faktor penggerak biaya (cost driver) dan alokasi biaya kegiatan sebagai variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tolitoli, yang berjumlah 37 instansi. Namun, hanya 29 OPD yang dijadikan sampel karena keterbatasan akses data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *saturated sampling* atau sensus, di mana seharusnya seluruh populasi dapat dijadikan sampel. Ketidaktersediaan data lengkap membuat semua OPD tidak dapat dianalisis, tetapi sampel 29 OPD tetap dianggap representatif karena mencakup mayoritas populasi yang diteliti.

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memahami hubungan antara jumlah kegiatan atau laporan kinerja dengan alokasi biaya yang diperlukan. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengembangkan model atau persamaan yang memperkirakan biaya berdasarkan faktor penggerak biaya. Model ini memungkinkan perhitungan rata-rata pengeluaran, penentuan batas pengeluaran minimum dan maksimum yang wajar, serta pengamatan pola distribusi alokasi biaya antar OPD.

Tahap awal analisis melibatkan perhitungan rata-rata pengeluaran yang dilakukan OPD untuk kegiatan penyusunan laporan kinerja. Nilai rata-rata ini kemudian dijadikan tolok ukur untuk menilai pengeluaran aktual setiap OPD. Selanjutnya, batas pengeluaran minimum dan maksimum ditentukan menggunakan ukuran *standard error*. Batas ini memungkinkan pengkategorian pengeluaran setiap OPD sebagai wajar, terlalu rendah, atau berlebihan.

Selain itu, analisis juga mencakup perhitungan persentase alokasi pengeluaran untuk setiap kegiatan. Persentase ini menunjukkan kontribusi masing-masing objek pengeluaran terhadap total biaya suatu kegiatan. Perhitungan dilakukan untuk rata-rata pengeluaran, selisih pengeluaran minimum, dan selisih pengeluaran maksimum. Pendekatan ini menyoroti variasi antar OPD dalam mengalokasikan anggaran mereka.

Tahap akhir adalah memverifikasi kewajaran biaya dengan membandingkan rata-rata, batas minimum, dan batas maksimum yang dihitung dengan anggaran aktual yang dialokasikan oleh setiap OPD. Jika alokasi berada di bawah batas minimum, dikategorikan sebagai kekurangan pendanaan (*underfinanced*). Jika melebihi batas maksimum, diklasifikasikan sebagai kelebihan pendanaan (*overfinanced*). Sementara itu, alokasi yang berada di antara kedua batas tersebut dianggap wajar. Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pengeluaran setiap OPD selaras dengan analisis standar belanja yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Dalam penelitian mengenai kewajaran anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli, satu jenis kegiatan yang akan dianalisis kewajarannya adalah kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian. Untuk dokumen realisasi belanja barang dan jasa Kabupaten Tolitoli tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKPD-OPD), peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi, yaitu dengan mencari data terkait hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan buku, seperti arsip RKPD-OPD yang tersimpan di kantor Bappeda Kabupaten Tolitoli.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyajikan status kemajuan dan hasil kinerja dari program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD, semakin banyak pula capaian kinerja yang harus dilaporkan kepada pimpinan daerah. Oleh karena itu, jumlah kegiatan tersebut menjadi faktor penggerak biaya (**cost driver**) dalam Analisis Standar Belanja (ASB).

Tabel 1. Data Jumlah Kegiatan dan Anggaran untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

OPD	Jumlah Kegiatan	Total Anggaran (IDR)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29	247.957.302.490,32
Dinas Kesehatan	7	89.883.548.477,30
RSUD Mokopido	11	49.255.392.105,51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	20.093.224.789,95
Dinas Pengawasan Perumahan dan Permukiman	13	10.990.583.419,17
Satuan Polisi Pamong Praja	13	416.316.321,48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	42.762.834,91
Dinas Sosial	8	950.196.341,15
Dinas Tenaga Kerja	12	410.414.522,79
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	175.774.225,27
Dinas Ketahanan Pangan	11	139.503.213,43
Dinas Lingkungan Hidup	20	550.663.313,30
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	191.887.108,37
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	536.541.787,10
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	702.669.648,91
Dinas Perhubungan	19	274.049.932,27
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	12	247.044.060,22
Dinas Koperasi dan UMKM	11	134.074.891,21
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	225.009.765,95
Dinas Pemuda dan Olahraga	6	331.921.527,85
Dinas Perpustakaan dan Arsip	10	311.320.880,08
Dinas Perikanan	9	839.785.686,83
Dinas Pariwisata	9	54.024.735,97
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	697.705.440,02
Dinas Perkebunan dan Peternakan	8	556.824.358,80
Dinas Perdagangan	11	222.704.613,87
Dinas Perindustrian	11	137.156.584,27
Dinas Transmigrasi	11	124.475.567,12
Sekretariat Daerah	16	1.072.714.723,00

Sumber: RKPD Kabupaten Tolitoli 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 29 OPD yang melaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD dengan jumlah kegiatan terbanyak, yaitu 29 kegiatan, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki jumlah kegiatan paling sedikit, yaitu 3 kegiatan. Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menempati alokasi tertinggi sebesar Rp 247.957.302.490,32 untuk 29 kegiatan, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat anggaran terendah sebesar Rp 42.762.834,91 untuk 3 kegiatan.

Untuk mengembangkan model ASB, dilakukan analisis regresi sederhana menggunakan data tersebut. Analisis ini bertujuan untuk membangun model yang menunjukkan hubungan antara jumlah kegiatan dengan total anggaran, yang menjadi dasar dalam menilai kewajaran biaya melalui metode Analisis Standar Belanja (ASB). Analisis regresi dilakukan menggunakan alat **Data Analysis** pada Microsoft Excel, dan hasilnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Sederhana untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-22780831863.267	18038008331.913		-1.263	.217		
	Jumlah kegiatan	3665682455.393	1400748588.806	.450	2.617	.014	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,014, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kegiatan di setiap OPD memiliki pengaruh signifikan terhadap total anggaran. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang bermakna antara faktor penggerak biaya (*cost driver*) berupa jumlah kegiatan dengan alokasi anggaran untuk penyusunan laporan capaian kinerja.

Koefisien regresi untuk variabel "jumlah kegiatan" sebesar 3.665.682.455,393, yang berarti bahwa setiap penambahan satu kegiatan akan meningkatkan anggaran penyusunan laporan capaian kinerja di OPD sebesar jumlah tersebut.

Uji T

Output regresi juga menyajikan nilai uji-t. Uji-t parsial diterapkan dalam analisis regresi untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara individual, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah: jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji T

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.2780831863.267	1.8038008331.913		-1.263	.217
	Jumlah kegiatan	3665682455.39	140748588.806	.450	2.617	0.14

a. Dependent Variable: Total Anggaran

Sumber: Data sekunder, output SPSS-25 (diolah pada tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji-t parsial yang ditunjukkan pada tabel koefisien, dapat diamati bahwa variabel konstanta tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap total anggaran karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,217, yang lebih besar dari 0,05. Sementara itu, variabel jumlah kegiatan memiliki nilai koefisien sekitar 3,66 miliar, dengan nilai t sebesar 2,617 dan tingkat signifikansi 0,014, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kegiatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap total anggaran. Dengan kata lain, setiap peningkatan jumlah kegiatan akan diikuti dengan peningkatan total anggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan capaian kinerja di OPD.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square / R^2) adalah ukuran statistik dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik variabel independen (X) menjelaskan variasi pada variabel dependen (Y). Secara sederhana, R^2 menunjukkan proporsi atau persentase dari total variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R^2 mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, jika R^2 mendekati 1, berarti variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh variasi pada variabel dependen.

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	.450 ^a	.202	.173	3.317.400,00
a. Predictors: (Constant), jumlah kegiatan				
b. Dependent Variable: Total Anggaran				

Sumber: Data sekunder, output SPSS-25 (diolah pada tahun 2025)

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R sebesar 0,450, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah kegiatan dengan total anggaran. Nilai R Square sebesar 0,202 menunjukkan bahwa jumlah kegiatan menjelaskan 20,2% variasi pada total anggaran, sementara 79,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Untuk menilai kewajaran belanja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja yang dianggarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata pengeluaran berdasarkan persamaan regresi ASB:

$$Y = (-22,780,831,863.267) + (3,665,682,455.393 \times \text{Jumlah Kegiatan})$$

Di mana Y merepresentasikan total anggaran dan X merepresentasikan jumlah kegiatan. Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan satu kegiatan akan meningkatkan anggaran sebesar Rp 3.665.682.455,39. Dengan nilai R Square sebesar 0,202, dapat disimpulkan bahwa sekitar 20,2% variasi pada total anggaran dapat dijelaskan oleh jumlah kegiatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Dengan demikian, persamaan regresi ini dapat dijadikan sebagai model ASB (Analisis Standar Belanja) untuk kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja. Persamaan regresi sederhana tersebut adalah:

$$Y = a + bX$$

$$Y = (-22,780,831,863.267) + (3,665,682,455.393)(29)$$

Dengan kata lain, model ASB untuk kegiatan ini dinyatakan sebagai:

$$\text{Total Pengeluaran} = (-22,780,831,863.267) + (3,665,682,455.393 \times \text{Jumlah Kegiatan})$$

Setelah memperoleh model ASB, langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata pengeluaran, batas pengeluaran minimum, dan batas pengeluaran maksimum. Mengacu pada Tabel 4, deviasi standar direpresentasikan oleh nilai *Standard Error* sebesar 3.317.400.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Rata-rata jumlah kegiatan adalah $345/29 = 11,897$. Nilai ini kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan regresi, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Rata-Rata} &= a + b (\text{rata-rata jumlah kegiatan}) \\ &= (-22,780,831,863.267) + (3,665,682,455.393 \times 11.897) \\ &= 20,828,149,071.58\end{aligned}$$

Langkah berikutnya menggunakan **t-tabel** dengan derajat kebebasan $(n - 2) = 27$, yang menghasilkan nilai t sebesar 1,703. Nilai ini menjadi acuan awal untuk menentukan biaya rata-rata. Batas pengeluaran minimum dihitung sebagai:

$$\begin{aligned}\text{Pengeluaran Minimum} &= (\text{Biaya Rata-Rata}) - t \times \text{SE} \\ &= 20,828,149,071.58 - (1.703 \times 3,317,400,000) \\ &= 20,824,589,501.38\end{aligned}$$

Dengan demikian, pengeluaran minimum sebesar Rp 20.824.589.501,38.

Batas pengeluaran maksimum dihitung sebagai:

$$\begin{aligned}\text{Pengeluaran Maksimum} &= (\text{Biaya Rata-Rata}) + t \times \text{SE} \\ &= 20,828,149,071.58 + (1.703 \times 3,317,400,000) \\ &= 20,831,708,641.78\end{aligned}$$

Dengan demikian, pengeluaran maksimum sebesar Rp 20.831.708.641,78.

Untuk menentukan persentase selisih, persentase pengeluaran minimum diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}&((\text{Biaya Rata-Rata} - \text{Pengeluaran Minimum}) / \text{Biaya Rata-Rata}) \times 100\% \\ &= (20,828,149,071.58 - 20,824,589,501.38) / 20,828,149,071.58 \times 100\% \\ &= 0.02 = 2\%\end{aligned}$$

Artinya, persentase pengeluaran minimum untuk setiap OPD dalam penyusunan laporan capaian kinerja adalah 98%.

Persentase pengeluaran maksimum diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}&((\text{Pengeluaran Maksimum} - \text{Biaya Rata-Rata}) / \text{Biaya Rata-Rata}) \times 100\% \\ &= (20,831,708,641.78 - 20,828,149,071.58) / 20,828,149,071.58 \times 100\% \\ &= 0.02 = 2\%\end{aligned}$$

Dengan demikian, persentase pengeluaran maksimum adalah 102%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rentang pengeluaran untuk kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja di antara OPD berada di kisaran 98% hingga 102% dari nilai biaya rata-rata.

Pembahasan

Menurut Ritonga (2010), yang dikutip dalam Agustina & Ritonga (2020), dalam menilai kewajaran anggaran: “jika anggaran kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap SKPD berada di antara batas atas dan batas bawah, maka anggaran belanja kegiatan tersebut dianggap wajar. Namun, jika anggaran berada di bawah batas bawah, disebut underfinancing; sebaliknya, jika melebihi batas atas, disebut overfinancing, yang menunjukkan penggunaan anggaran yang berlebihan.” Berdasarkan kriteria ini, berikut adalah hasil penilaian kewajaran anggaran OPD dalam penyusunan laporan capaian kinerja di Kota Tolitoli.

Tabel 5. Hasil Analisis Kewajaran Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja di Kota Tolitoli Tahun 2024

OPD	Jumlah Kegiatan	Total Anggaran	Hasil Analisis Standar Belanja	Batas Minimum	Batas Maksimum	Hasil
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29	247.957.302,49 0,32	2.793.601.216.585,0 0	267.923.491.330,42	268.030.682.165,12	Tidak Wajar
Dinas Kesehatan	7	89.883.548.477,30	881.600.230.905,00	89.011.769.071,64	89.047.380.901,63	Wajar
RSUD Mokopido	11	49.255.392.105,51	1.099.721.734.870,00	49.236.126.543,55	49.255.824.933,84	Wajar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	20.093.224.789,95	809.638.348.740,00	20.089.778.605,92	20.097.816.124,87	Wajar
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	10.990.583.419,17	242.880.819.807,00	1.619.014.428,46	1.619.662.163,78	Melebihi
Satuan Polisi Pamong Praja	13	416.316.321,48	28.140.209.358,00	416.165.804,63	416.332.304,25	Wajar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	42.762.834,91	3.583.412.067,00	42.762.569,55	42.779.678,00	Wajar
Dinas Sosial	8	950.196.341,15	4.037.742.527,00	62.925.958,19	62.951.133,61	Melebihi
Dinas Tenaga Kerja	12	410.414.522,79	33.477.989.876,00	165.564.726,03	165.630.965,17	Melebihi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	175.774.225,27	18.091.512.815,00	48.008.679,97	48.027.887,29	Melebihi
Dinas Ketahanan Pangan	11	139.503.213,43	5.512.196.230,00	55.109.095,03	55.131.143,08	Melebihi
Dinas Lingkungan Hidup	20	550.663.313,30	92.722.948.461,00	296.799.762,85	296.918.506,51	Melebihi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	191.887.108,37	23.488.714.812,00	121.686.701,92	121.735.386,34	Melebihi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	536.541.787,10	45.769.921.714,00	237.393.178,78	237.488.155,05	Melebihi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	702.669.648,91	57.120.765.929,00	283.351.759,57	283.465.122,94	Melebihi
Dinas Perhubungan	19	274.049.932,27	34.330.609.824,00	230.115.083,13	230.207.147,58	Melebihi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian,	12	247.044.060,22	16.477.311.033,00	106.879.484,35	106.922.244,69	Melebihi

dan Statistik						
Dinas Koperasi dan UMKM	11	134.074.891,21	5.212.644.470,00	51.757.344,67	51.778.051,75	Melebihi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	10	225.009.765,95	10.083.302.812,00	88.592.414,31	88.627.858,36	Melebihi
Dinas Pemuda dan Olahraga	6	331.921.527,85	37.711.626.299,00	331.899.979,25	332.032.765,80	Wajar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	311.320.880,08	17.950.686.430,00	104.918.917,97	104.960.893,93	Melebihi
Dinas Perikanan	9	839.785.686,83	52.512.059.203,00	342.956.197,19	343.093.407,11	Melebihi
Dinas Pariwisata	9	54.024.735,97	9.903.486.128,00	54.759.101,86	54.781.009,89	Kurang
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8	697.705.440,02	21.247.096.053,00	654.299.564,84	654.561.337,02	Melebihi
Dinas Perkebunan dan Peternakan	8	556.824.358,80	23.965.035.931,00	243.855.859,60	243.953.421,46	Melebihi
Dinas Perdagangan	11	222.704.613,87	11.997.349.184,00	92.384.139,66	92.421.100,71	Melebihi
Dinas Perindustrian	11	137.156.584,27	6.420.692.575,00	43.526.932,12	43.544.346,38	Melebihi
Dinas Transmigrasi	11	124.475.567,12	5.515.129.205,00	38.514.008,62	38.529.417,30	Melebihi
Sekretariat Daerah	16	1.072.714.723,00	118.873.531.167,00	1.994.288.729,54	1.995.086.604,60	Kurang

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tolitoli Tahun 2024 (Data diolah)

Analisis Standar Belanja untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

Kegiatan penyusunan laporan kinerja menunjukkan adanya indikasi pemborosan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran kegiatannya. Pemborosan ini mengindikasikan kurangnya pertimbangan yang tepat dalam alokasi belanja untuk kegiatan tersebut. Ketidakefisienan ini dapat berdampak pada pengurangan anggaran bagi kegiatan lain di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), baik untuk tugas rutin perkantoran maupun kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Dalam konteks penganggaran, apabila suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki alokasi anggaran yang rendah untuk kegiatan perencanaan capaian kinerja, hal ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik serta mengakibatkan kinerja organisasi menjadi tidak optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Suryadi (2024) berjudul *“The Fairness of Budget Allocation Based on Expenditure Standard Analysis (ASB) in the Padang City Government”* menunjukkan bahwa ketidakseimbangan alokasi anggaran, baik yang terlalu rendah (*underfinance*) maupun terlalu tinggi (*overfinance*), dapat mengurangi efisiensi serta menghambat pencapaian target kinerja organisasi. Hasil penelitian tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan dalam alokasi anggaran yang sejalan dengan output yang diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat optimal.

Untuk kegiatan capaian kinerja yang dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, dari 29 kegiatan hanya tiga yang memiliki anggaran dengan kategori *underfinance*. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan *Analysis of Spending Standards* (ASB) terhadap setiap alokasi belanja pada masing-masing kegiatan OPD. Hal ini penting guna mencegah terjadinya ketidakefisienan anggaran dalam alokasi belanja, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih rasional dan proporsional. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun berikutnya, penyusunannya perlu disesuaikan dengan ASB agar masuk dalam kategori “wajar”, sedangkan kegiatan yang sudah termasuk kategori wajar harus tetap dipertahankan konsistensinya.

Verifikasi Kewajaran

Kewajaran anggaran untuk kegiatan penyusunan laporan kinerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada Tabel 5. Dari 29 OPD yang melaksanakan kegiatan tersebut, sebanyak 23 OPD memiliki anggaran yang dinilai tidak wajar, sedangkan 6 OPD lainnya termasuk dalam kategori wajar. Dari 23 OPD yang anggarannya dinilai tidak wajar tersebut, 20 di antaranya masuk dalam kategori *overfinanced* (kelebihan anggaran), sementara 3 OPD lainnya termasuk dalam kategori *underfinanced* (kekurangan anggaran).

KESIMPULAN

Penilaian kewajaran anggaran dapat dilihat dari apakah alokasi anggaran berada dalam batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan. Jika alokasi berada di bawah batas minimum, maka dikategorikan sebagai *underfinanced* (kekurangan anggaran), yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, apabila anggaran melebihi batas maksimum, maka dikategorikan sebagai *overfinanced* (kelebihan anggaran), yang dapat menyebabkan penggunaan dana menjadi tidak efisien atau boros. Apabila anggaran berada di antara kedua batas tersebut, maka dianggap *fair* atau wajar serta sesuai untuk mencapai tujuan program.

Untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tolitoli disarankan untuk menerapkan *Analysis of Spending Standards* (ASB) sebagai pedoman dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Langkah ini akan membantu meningkatkan efisiensi, memastikan pencapaian output, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Setiap program juga perlu didukung dengan indikator kinerja yang jelas serta target output yang terukur agar penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara objektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan sampel diperluas mencakup seluruh OPD dan menambahkan variabel seperti kualitas laporan serta efektivitas anggaran, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kewajaran anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F. G. (2024). *Analisis Standar Belanja (ASB) untuk penyusunan RKA-APBD kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum (Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Magelang tahun 2023)*.
- Agustina, M. F. (2020). Analisis Model Analisa Standar Belanja (Studi Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58803>
- Bappeda Tolitoli. (2020). *Laporan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tolitoli*.
- Cahyono, T. (2014). Perancangan basisdata sistem informasi perhitungan ASB (Analisis Standar Belanja) pemerintahan daerah. *Agustus*, 7(2), 60.

- Djefris, D., Rosalina, E., Rasyidah, R., Wirahadi Ahmad, A., & Misra, F. (2021). Analisis standar belanja (ASB) pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 50–67. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.116>
- Hakim, L. N., & Hamzah, A. P. (2022). Simulasi perhitungan analisis standar belanja sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD pada pemerintah Kabupaten Banyuasin. *Jurnalku*, 2(4), 513–526. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.312>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta.
- Nadir, R., Arif, M. R., & Fatmawati, F. (2020). Modelling analisis standar belanja dalam kewajaran anggaran (Studi empiris pada pemerintah daerah Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 197–205. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1580.197-205>
- Nas, U., Suun, M., & Nasaruddin, F. (2020). Analisis standar belanja dan kewajaran anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 3(2), 76–82. <https://doi.org/10.37888/bjra.v3i2.227>
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (ASB).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Putra, W. (2018). *Tata kelola keuangan daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 4286. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rezki, A., Basri, F., Kabupaten Bulukumba, A., Sulawesi, P., Program, S., & Publik, S. K. (2020). Analisis standar belanja di organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba (Fokus pada pola perilaku belanja).
- Ritonga, I. T. (2009). *Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Sari, P. I. P., & Suryadi, D. (2024). Kewajaran pengalokasian anggaran berbasis analisis standar belanja (ASB) pada pemerintah Kota Padang. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 56–62. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i1.791>

- Siraz, R. (2023). Penyusunan analisa standar belanja Kota Pekanbaru. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 20(1), 56–72. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v20i1.278>
- Skpd, U., & Magelang, K. (2025). Jurnal jendela inovasi daerah RKA-APBD kegiatan penyediaan jasa pelayanan, 119–146.
- Standar, A., & Pemerintah, B. (2025). *2024 tentang analisis standar belanja pemerintah kabupaten*.
- Sugiarto, T. (2022). *Modelling dan analisis standar belanja di pemerintah daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafis, K. S. (2020). Evaluasi kewajaran pembelanjaan daerah dengan menggunakan analisis standar belanja (Studi pada pemerintah Kota Jambi). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59366>
- Trisilia, M. (2016). Analisis standar belanja untuk penyusunan RKA-APBD kegiatan penyediaan bahan bacaan (Studi pada SKPD di pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 147–158. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i1.108>
- Yusuf, M., Rahmawati, R., & Aswar, A. (2020). Penyusunan analisis standar belanja pembangunan gedung dan rehabilitasi ruang kelas lingkup pemerintah Kabupaten Buton tahun 2019. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 9–16. <https://doi.org/10.35906/resona.v3i2.386>
- Laporan penyusunan analisis standar belanja pemerintah Pekalongan tahun 2021.